

## **PENGUASAAN LAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIFERENSIASI STRUKTUR SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PETANI (Studi Kasus pada Dua Komunitas Petani Kelapa Sawit di Provinsi Riau)**

**Undang Fadjar<sup>1</sup>**

**Abstrak** Penelitian untuk mengenalisis tingkat perubahan penguasaan lahan serta implikasinya terhadap diferensiasi struktur sosial dan kesejahteraan yang terjadi pada komunitas petani kelapa sawit telah dilakukan. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi kasus majemuk pada dua komunitas petani kelapa sawit. Komunitas pertama merupakan petani PIR-Bun yang proses pembentukan komunitas dan penguasaan kebun sawitnya melalui fasilitasi pemerintah, sedangkan komunitas kedua merupakan petani lokal yang proses pembentukan komunitas serta proses penguasaan kebun sawitnya ditempuh melalui usaha sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial komunitas petani kelapa sawit terdiferensiasi dalam tiga lapisan, yaitu : 1) petani pemilik (lapisan atas), 2) buruh tani (lapisan bawah), dan 3) pemilik + buruh tani (lapisan menengah). Struktur sosial tersebut mendekati bentuk yang terpolarisasi dan berimplikasi pada diferensiasi kesejahteraan petani. Dalam hal ini, pada komunitas petani sawit muncul lapisan petani "kaya raya", "kaya", "sedang", dan "miskin". Lapisan petani miskin berasal dari lapisan "petani pemilik + buruh tani" dan lapisan "buruh tani". Walaupun mendekati bentuk polarisasi, struktur tersebut tidak disertai dengan munculnya konflik sosial antar lapisan karena: adanya jalan mobilitas sosial vertikal, tidak ekstrimnya perbedaan status sosial-ekonomi antar lapisan, serta tumbuhnya beragam jalinan hubungan sosial antar petani yang tinggal dalam pemukiman yang sama.

**Kata Kunci :** *penguasaan lahan, struktur sosial, kesejahteraan, komunitas petani sawit.*

*Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit*

<sup>1</sup>Undang Fadjar (✉)  
PT Riset Perkebunan Nusantara  
Jl. Salak 1A, Bogor, Jawa Barat  
email : un\_fad@yahoo.co.id

**Abstract** This research aimed to analyze behavioral changes of land ownership imply to social structure differentiation and farmer welfare differentiation. Data and information obtained was based on multiple case studies conducted on two palm oil farmer communities. The first community was a PIR-Bun community developed by government, while the second community is a local community that it has naturally existed for a long period. The result showed that the social structure of palm oil farmer community was differentiated into three levels, those were: 1) land owner farmer, 2) land owner farmer + labor, and 3) labor. This social structure was going to be polarized. Along with the differentiation, a differentiation in farmers' welfare could be classified into four levels : the richest, the rich, the medium rich, and the poor. However, the social structure was not followed by a social conflict between land owner and labor; this was due to three factors; those are a slight difference of socio-economy status between them, a mutual help among farmer who lived in the same settlement, and a way for vertically social mobility

**Keywords :** land ownership, social structure, welfare, farmer community, palm oil

### **PENDAHULUAN**

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang berkembang pesat. Tahun 2008, luas perkebunan sawit di Indonesia sudah mencapai 7 juta hektar, padahal 20 tahun sebelumnya kurang dari satu juta hektar (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008). Meskipun sebagian besar perkebunan sawit diusahakan perusahaan besar swasta dan negara, tetapi petani kecil tetap mendapat kesempatan mengusahakan tanaman tersebut. Tahun 2008, luas perkebunan sawit petani kecil mencapai 2,9 juta hektar (41% dari luas perkebunan sawit Indonesia). Untuk memperluas peluang

masyarakat dalam mengusahakan sawit, sejak tahun 2007 pemerintah memasukkan tanaman sawit dalam program revitalisasi perkebunan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2007).

Pada awalnya, petani kecil mengusahakan sawit melalui fasilitasi pemerintah (PIR-Bun dan kemitraan). Dalam lima tahun terakhir, pembangunan kebun sawit melalui usaha swadaya petani berkembang pesat. Pola manapun yang dilalui petani, penguasaan lahan menjadi pintu masuk mereka untuk dapat mengusahakan tanaman sawit. Dalam proses produksi pertanian, lahan menjadi kekuatan produksi (*force of production*) penting karena kegiatan produksi dimulai di atas lahan dan kemudian menjadi sumber penghasilan keluarga petani.

Dengan kata lain, penguasaan lahan merupakan "basis kesejahteraan" keluarga petani karena akan menjadi tumpuan mereka dalam "memenuhi kelangsungan hidup" (*survival*) dan "membuat kehidupan yang lebih baik" (*a better living*). Oleh sebab itu, berlangsungnya perubahan penguasaan lahan akan menentukan sejauh mana diferensiasi struktur sosial dan diferensiasi kesejahteraan dalam komunitas petani. Secara umum, Syahza dan Kawasrina (2007) menyimpulkan bahwa pembangunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian pedesaan tetapi dinamika perubahan kesejahteraan dan perbedaan kesejahteraan antar lapisan petani terkait penguasaan lahan belum dicermati. Oleh sebab itu tulisan ini akan memaparkan tingkat perubahan penguasaan lahan yang terjadi pada komunitas petani kelapa sawit dan melihat implikasi perubahan tersebut terhadap diferensiasi struktur sosial dan diferensiasi kesejahteraan dalam komunitas petani kelapa sawit.

## BAHAN DAN METODE

### Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan posisi lahan sebagai modal produksi, muncul berbagai pola hubungan sosial di antara petani agar mereka dapat menguasai lahan. Hubungan sosial tersebut disebut "hubungan sosial produksi" atau "hubungan penguasaan lahan" (Ray, 2002 dan Sunderson, S. K., 2003). Lebih lanjut, adanya hubungan sosial dalam penguasaan lahan akan membentuk struktur sosial dalam komunitas petani.

Berdasarkan hubungan sosial dalam penguasaan lahan, perubahan struktur sosial komunitas petani akan merujuk pada gejala penajaman diferensiasi kelas.

Diferensiasi tersebut kemudian akan membentuk struktur komunitas petani yang "semakin berlapis" (stratifikasi) atau "semakin terpolarisasi". Pada kasus komunitas petani, Hayami dan Kikuchi (1987) mengartikan **stratifikasi** sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang melipatgandakan sub-kelas komunitas petani dalam rangkaian spektrum mulai dari buruh tani tunakisma sampai ke tuan tanah. Sementara itu, **polarisasi** diartikan sebagai proses perkembangan ketidaksamaan yang mengkutubkan komunitas petani menjadi (hanya) dua lapisan, yakni petani luas komersial yang kaya dan buruh tani tunakisma yang miskin.

Berkembangnya cara produksi yang semakin kapitalis akan membangkitkan perubahan penguasaan lahan, khususnya dari penguasaan kolektif (*collective ownership*) menuju penguasaan perorangan (*private ownership*). Perubahan tersebut semakin cepat manakala penerapan cara produksi intensif-padat modal dan tekanan agraris semakin dominan. Manakala laju perubahan cara produksi tidak mencapai "kapitalis penuh" dan berhenti pada cara produksi transisional, maka perubahan penguasaan lahan tidak mendorong diferensiasi struktur sosial menuju polarisasi tetapi justru menuju stratifikasi.

Meskipun melalui mekanisme yang berbeda, kedua arah perubahan struktur sosial tersebut sama-sama memberi jalan bagi munculnya diferensiasi kesejahteraan pada komunitas petani. Dalam hal struktur sosial komunitas petani terpolarisasi, jumlah kaum tani yang kehilangan kontrol atas lahan akan sangat banyak dan kemudian mereka hanya menjadi buruh yang kehidupannya sangat tergantung pada pihak lain (pemilik lahan). Kemudian, dalam hal struktur sosial komunitas petani terstratifikasi, proses pemiskinan petani akan terjadi akibat "eksploitasi di dalam komunitas petani" maupun "eksploitasi dari luar komunitas" (harga produk rendah, harga input tinggi).

Pada dasarnya, kesejahteraan petani akan bertumpu pada sejauh mana petani memiliki kekuasaan atas lahan sehingga mereka memperoleh penghasilan yang memadai dan berkelanjutan untuk "memenuhi kelangsungan hidup" (*survival*) dan "membuat kehidupan yang lebih baik" (*a better living*). Manakala basis penghasilan petani masih bertumpu pada lahan, maka berkurangnya kontrol mereka atas penguasaan lahan akan menimbulkan berkurangnya penghasilan keluarga petani dan kemudian menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan petani.

### Strategi Penelitian

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang dinamika realitas sosial yang terjadi pada komunitas petani sawit, maka penelitian ini menerapkan strategi studi kasus majemuk pada dua komunitas petani sawit dengan latar belakang berbeda, khususnya terkait pembentukan komunitas; proses penguasaan lahan dan pendekatan pembangunan kebun kelapa sawit. Strategi ini dipilih sejalan dengan pendapat Newman (1997) dan Yin (2002) bahwa studi kasus dapat memahami realitas sosial yang kompleks melalui pengumpulan data dan informasi yang lebih rinci, lebih bervariasi, lebih luas, dan lebih mendalam. Sebagai studi kasus majemuk, penelitian ini merupakan gabungan dua studi kasus yang memiliki persoalan; tujuan; dan metoda penelitian yang sama dan dilaksanakan secara bersamaan sehingga terhadap kedua kasus tersebut dapat dilakukan analisis perbandingan.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung April - Oktober 2008 di wilayah sentra perkebunan sawit rakyat, baik yang berkembang melalui program pemerintah dan swasta maupun swadaya petani. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan di provinsi Riau dimana kedua pendekatan dalam pengembangan perkebunan sawit rakyat tersebut berlangsung pesat. Pada tahun 2007, luas perkebunan kelapa sawit rakyat di provinsi Riau mencapai 576.312 hektar atau 44,57 % dari total luas areal kebun sawit di provinsi tersebut (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2008).

Bertolak dari pertimbangan untuk melaksanakan studi kasus majemuk, maka komunitas petani sawit yang terpilih adalah: 1) Komunitas Petani PIR-Bun di Desa SK, komunitas petani dimaksud terbentuk melalui program transmigrasi yang dikaitkan dengan program PIR-Bun, dan 2) Komunitas Petani Lokal di Desa PR, komunitas petani tersebut terbentuk secara alami melalui mobilitas spontan selama puluhan tahun.

### Metoda Pengumpulan dan Analisa Data

Data dan informasi utama yang dikumpulkan merupakan data dan informasi primer tentang penguasaan lahan, struktur sosial dalam komunitas petani berdasarkan penguasaan lahan, dan tingkat kesejahteraan petani. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui tiga cara,

yaitu *Focus Group Discussion* (FGD), Wawancara Mendalam, dan Observasi Lapangan. Dengan demikian, prinsip triangulasi metode serta sumber data untuk menghasilkan konsistensi dan kongruensi dapat terpenuhi. FGD dilaksanakan dua tahap, yaitu pada aras komunitas (setara desa) dan pada aras sub komunitas (setara dusun).

Data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah Indeks Gini untuk melihat distribusi (penyebaran) penguasaan lahan pada komunitas petani sehingga dapat diperoleh gambaran apakah penyebaran penguasaan lahan tergolong merata atau timpang. Sementara itu, analisa kualitatif, digunakan terutama untuk mendeskripsikan pola-pola hubungan sosial dalam penguasaan lahan, baik dimensi struktur (posisi dan peranan aktor): dimensi pengaturan (prosedur, penetapan insentif atau sanksi), serta sistem-sistem makna yang melandasi dan memberi pedoman terhadap pola-pola hubungan sosial tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Dua Komunitas Petani Lokasi Penelitian

Komunitas petani lokal di desa PR sudah terbentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. Warga komunitas di desa ini terus bertambah karena kelahiran warga asli dan kehadiran pendatang. Ditinjau dari latar belakang etnis, warga komunitas petani di Desa PR yang berlatar etnis asli (Riau atau Melayu) relatif dominan (64%). Mereka terdiri dari warga asli keturunan pendiri komunitas (44%) dan warga pendatang dari desa lain di provinsi Riau (20%). Para pendatang non Melayu terutama berasal dari pulau Jawa (15%) dan Sumatera Utara (18%). Sebagian besar pendatang Melayu dan Jawa sudah tinggal sejak awal kemerdekaan. Sementara itu, para pendatang dari Sumatera Utara umumnya datang sejak berkembangnya penanaman sawit di desa PR (pertengahan tahun 90-an).

Sementara itu, komunitas petani PIR-Bun di desa SK dibentuk melalui program transmigrasi tahun 1985. Pada awalnya, warga komunitas petani PIR-Bun di Desa SK terdiri dari 80% pendatang (terutama dari Jawa) dan 20% penduduk lokal (dari desa sekitar). Akan tetapi, saat itu banyak penduduk lokal yang kembali ke desa asalnya, meskipun kebun sawit PIR-bun tetap mereka miliki. Setelah 22 tahun terbentuk, warga komunitas petani di desa SK bukan hanya KK Inti (peserta PIR-Bun) tetapi juga pecahan KK (anak

peserta PIR-Bun yang sudah berkeluarga) serta pendatang spontan dari Jawa dan Sumatera Utara.

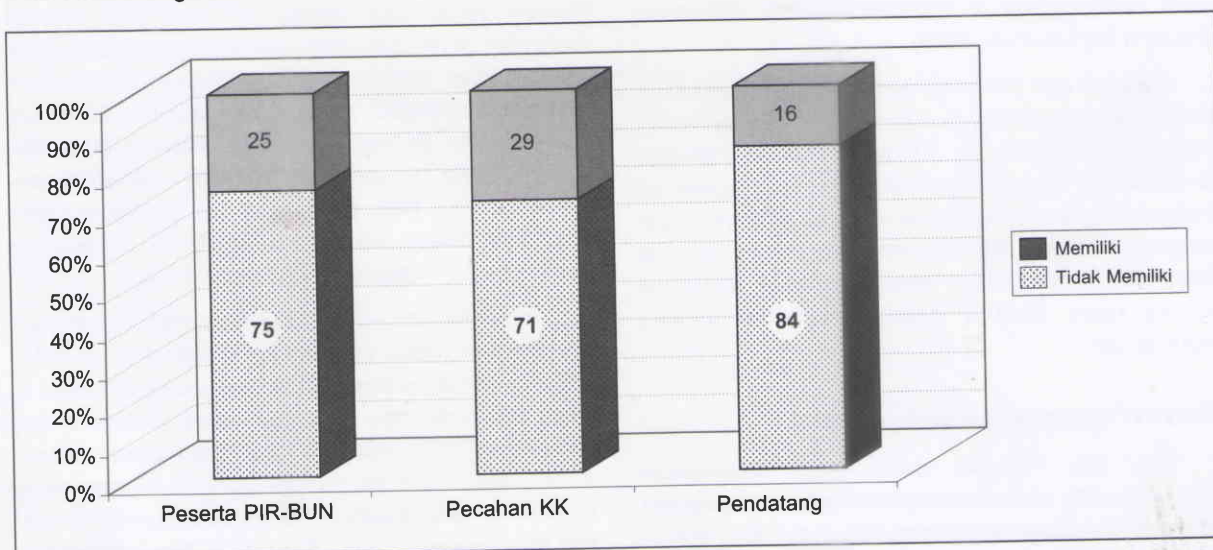
### Perubahan Penguasaan Lahan

Secara historis, perjalanan proses penguasaan lahan dalam komunitas petani lokal di Desa PR dan dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK terdapat perbedaan, baik waktu maupun mekanisme. Warga komunitas petani lokal di Desa PR umumnya memperoleh lahan melalui upaya sendiri (membuka hutan atau bekas hutan, pewarisan atau transaksi jual beli). Akan tetapi mekanisme buka hutan/bekas hutan sudah berakhir sekitar awal 90-an karena lahan tersebut sudah tidak tersedia. Setelah itu, mekanisme yang berkembang adalah jual beli dan pewarisan. Sementara itu, sebagian besar warga komunitas petani di desa SK yang sebelumnya peserta PIR-Bun memperoleh lahan (kebun sawit) pertama melalui fasilitas pemerintah.

Pada saat awal kebun sawit diserahkan kepada petani, semua warga komunitas petani PIR-Bun di Desa SK (peserta program PIR-Bun) memperoleh luas lahan yang sama (merata). Namun demikian, pada saat penelitian berlangsung (sekitar 20 tahun kemudian), ternyata keadaannya sudah berubah. Luas lahan yang dimiliki sebagian petani peserta telah bertambah sedangkan sebagian lainnya malahan berkurang, sehingga luas penguasaan lahan masing-masing rumah tangga warga komunitas petani PIR-Bun sudah beragam.

Berkurangnya luas lahan petani PIR-Bun umumnya terjadi karena petani peserta menjual kebunnya kepada petani lain. Akan tetapi, proses tersebut umumnya terjadi pada periode awal dimana produktivitas kebun masih rendah dan banyak petani yang belum yakin bahwa kebun tersebut akan menjadi miliknya. Sementara itu, bertambahnya luas lahan milik petani PIR-Bun umumnya melalui mekanisme berikut : 1) membeli lahan yang sudah menjadi kebun (di lokasi PIR-Bun desa yang sama atau desa lain), dan 2) membeli lahan kosong melalui ninik mamak (kepala adat) atau langsung dari penduduk setempat (di desa sekitar atau desa lain yang cukup jauh). Pembelian lahan di luar desa untuk membangun kebun sawit tidak hanya dilakukan petani peserta yang telah memiliki kebun sawit tetapi juga oleh buruh tani, yaitu pecahan KK dan pendatang (Gambar 1.).

Beberapa situasi yang mempercepat perluasan kebun milik petani adalah : 1) keberanian berspekulasi membeli kebun sawit atau lahan yang statusnya belum jelas, 2) banyak petani peserta yang menjual kebun dengan harga murah, khususnya pada periode awal berada di lokasi PIR-Bun (mereka pindah ke lokasi lain atau kembali ke tempat asal), dan 3) adanya kredit dari bank untuk petani pemilik kebun sehingga memungkinkan mereka melakukan ekspansi usaha dengan membangun kebun sawit.



Sumber data : Sensus rumah tangga melalui FGD

Gambar 1. Penguasaan lahan di luar desa oleh para petani di Desa SK, 2008.

### Diferensiasi Struktur Sosial Komunitas Petani

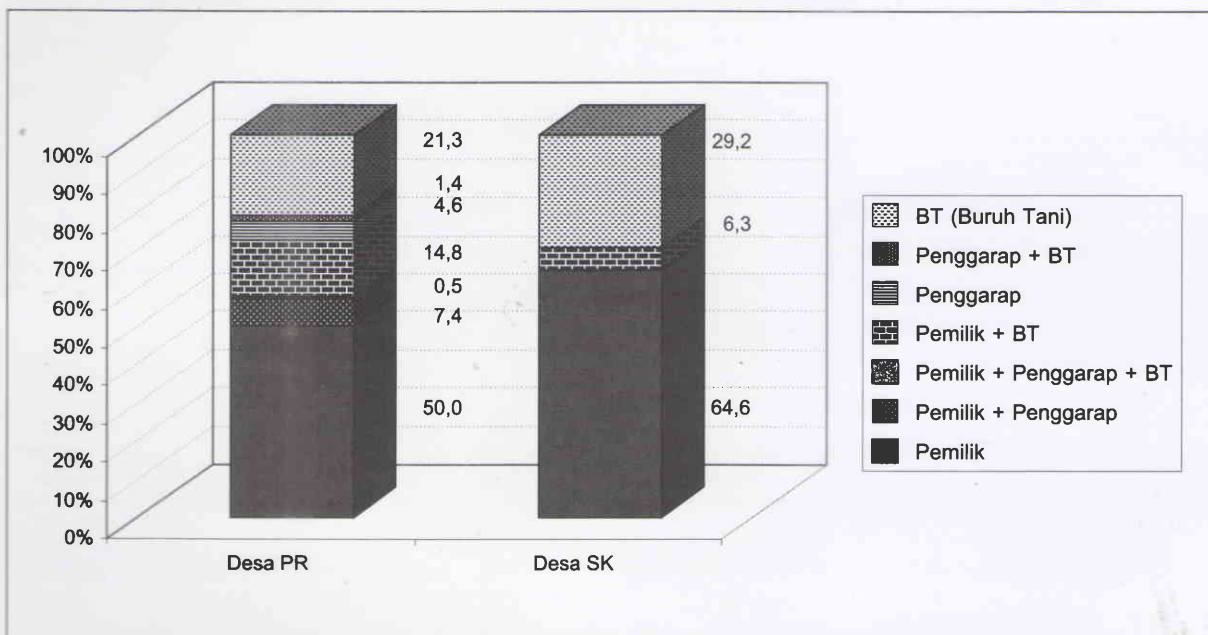
#### a. Bertambahnya Lapisan Petani dan Meningkatnya Jumlah Tunakisma

Berbasis hubungan sosial dalam penguasaan lahan (penguasaan tetap dan penguasaan sementara), hasil sensus rumah tangga di dua komunitas petani kasus menunjukkan bahwa struktur sosial komunitas petani kelapa sawit yang muncul saat ini terdiferensiasi lebih dari dua lapisan. Sebagian dari lapisan-lapisan tersebut dibangun dengan status "tunggal" (status tersebut menjadi basis dasar pelapisan komunitas petani), sedangkan sebagian lapisan lainnya dibangun dengan status jamak atau "kombinasi". Secara lebih rinci, ragam lapisan komunitas petani yang muncul di kedua desa tersebut adalah:

1. **Petani Pemilik.** Petani lapisan ini menguasai lahan hanya melalui pemilikan tetap (petani pemilik yang lahannya diusahakan sendiri dan/atau diusahakan orang lain),
2. **Petani Pemilik + Penggarap.** Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan tetap dan pemilikan sementara (mengusahakan lahan milik petani lain)

3. **Petani Pemilik + Buruh Tani.** Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan tetap. Selain itu, mereka juga menjadi buruh tani
4. **Petani Pemilik + Penggarap + Buruh Tani.** Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan tetap dan pemilikan sementara serta menjadi buruh tani
5. **Petani Penggarap.** Petani lapisan ini menguasai lahan hanya melalui pemilikan sementara. Lapisan petani penggarap termasuk tunakisma tidak mutlak karena mereka termasuk petani yang menguasai lahan (pemilikan sementara)
6. **Petani Penggarap + Buruh Tani.** Petani lapisan ini menguasai lahan melalui pemilikan sementara. Selain itu, mereka juga menjadi buruh tani. Lapisan ini termasuk tunakisma tetapi tidak mutlak.
7. **Buruh Tani.** Petani lapisan ini benar-benar tidak menguasai lahan sehingga termasuk tunakisma mutlak. Mereka hanya memperoleh manfaat dari lahan sebagai buruh tani.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2., pada dasarnya bila suatu komunitas petani hanya mengusahakan sawit, maka lapisan sosial yang



Sumber data : Sensus rumah tangga melalui FGD

Gambar 2. Struktur penguasaan lahan pada komunitas petani kelapa sawit di dua komunitas kasus, 2008.

muncul pada komunitas tersebut hanya tiga, yaitu : 1) lapisan petani pemilik (lapisan atas), 2) lapisan buruh tani (lapisan bawah), dan 3) lapisan pemilik + buruh tani (lapisan menengah). Realitas tersebut sudah terjadi pada komunitas petani PIR-Bun di Desa SK. Di masa yang akan datang, realitas dimaksud juga akan terjadi dalam komunitas petani lokal di Desa PR karena para petani pemilik dalam komunitas tersebut secara bertahap mengganti tanaman lain dengan sawit.

Secara teknis, rentang waktu panen sawit yang tidak terus menerus (satu kali dalam dua minggu) hanya melahirkan hubungan sosial produksi antara petani pemilik dengan petani tunakisma melalui mekanisme buruh upahan. Sementara itu, sebagaimana terjadi dalam komunitas petani lokal di Desa PR, rentang waktu panen karet yang terus menerus (setiap hari atau minimal satu kali per dua hari) telah mendorong munculnya hubungan sosial produksi antara petani pemilik dengan petani tunakisma melalui mekanisme penggarapan bagi hasil. Oleh sebab itu, dalam komunitas petani lokal di Desa PR selain muncul tiga lapisan sebagaimana di desa SK juga muncul empat lapisan lain, yaitu : lapisan Petani Penggarap; lapisan

Petani Pemilik + Penggarap; lapisan Petani Pemilik + Penggarap + Buruh Tani; dan lapisan Petani Penggarap + Buruh Tani.

Gambar 2 juga menunjukkan bahwa dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK bentuk struktur sosial yang muncul merupakan struktur yang sudah sangat dekat dengan bentuk polarisasi (sub-kelas komunitas petani hanya melipat dalam tiga lapisan). Keadaan tersebut berbeda dengan struktur sosial petani PIRBun karet yang cenderung melahirkan struktur sosial terstratifikasi (Fadjar *et.al.*, 2002). Munculnya lapisan Petani Pemilik + Buruh Tani (lapisan tengah) karena adanya pemilik kebun yang lahannya relatif sempit atau belum berproduksi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya mereka masih harus menjalankan peran buruh tani. Sebaliknya, struktur sosial yang muncul pada komunitas petani lokal di Desa PR merupakan struktur sosial yang terstratifikasi. Dalam hal ini komunitas petani di desa PR melipat menjadi banyak lapisan. Realitas tersebut muncul karena di desa PR sebagian lahan masih digunakan untuk karet. Bentuk struktur sosial yang terstratifikasi juga muncul pada struktur sosial petani kakao (Fajar *et.al.*, 2008).

Tabel 1. Distribusi rumah tangga petani di dua desa kasus berdasarkan status penguasaan lahan, 2008.

| Status dalam Penguasaan Lahan        | PR         |               | SK         |               |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                      | N          | %             | N          | %             |
| 1. Pemilik                           | 108        | 50,00         | 124        | 64,58         |
| 2. Pemilik + Penggarap               | 16         | 7,41          | 0          | -             |
| 3. Pemilik + Penggarap + Buruh Tani  | 1          | 0,46          | 0          | -             |
| 4. Pemilik + Buruh Tani              | 32         | 14,81         | 12         | 6,25          |
| 5. Penggarap                         | 10         | 4,63          | 0          | -             |
| 6. Penggarap + Buruh Tani            | 3          | 1,39          | 0          | -             |
| 7. Buruh Tani                        | 46         | 21,30         | 56         | 29,17         |
| <b>Total</b>                         | <b>216</b> | <b>100,00</b> | <b>192</b> | <b>100,00</b> |
| A. Total Pemilik                     | 157        | 72,69         | 136        | 70,83         |
| B. Total Tunakisma                   | 59         | 27,31         | 56         | 29,17         |
| • Tunakisma Tidak Mutlak (Penggarap) | 13         | 6,02          | -          | -             |
| • Tunakisma Mutlak (Buruh Tani)      | 46         | 21,30         | 56         | 29,17         |

Sumber data : Sensus Rumah tangga melalui FGD

Secara keseluruhan, hasil sensus di dua komunitas petani kasus menunjukkan bahwa proporsi petani yang memiliki status sebagai petani pemilik (tunggal + kombinasi) masih dominan (Tabel 1.). Walaupun demikian, di kedua komunitas tersebut proporsi tunakisma sudah cukup besar. Dalam komunitas petani lokal di Desa PR jumlah tunakisma sudah mencapai 27,31% dan mereka terdiri dari petani penggarap, buruh tani, dan penggarap + buruh tani. Sementara itu, dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK jumlah tunakisma mencapai 29,17% dan seluruhnya merupakan buruh tani.

Di kedua komunitas petani kasus, peluang kerja buruh tani terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kebun sawit yang tidak dipanen/dipelihara pemiliknya. Secara khusus, dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK, peningkatan peluang kerja buruh tani sejalan dengan meningkatnya usia tanaman sawit (pohon semakin tinggi) serta semakin tuanya usia para petani pemilik sehingga untuk melakukan panen sawit diperlukan tenaga muda yang lebih kuat. Sementara itu, dalam komunitas petani lokal di Desa PR peluang bekerja sebagai buruh tani kebun sawit meningkat pesat sejak hadirnya kebun milik petani kaya raya yang tinggal di desa atau di luar desa.

Berdasarkan luas sumberdaya lahan yang dimiliki, hasil penelitian di dua komunitas kasus menunjukkan bahwa lapisan petani pemilik umumnya merupakan

petani kecil karena mereka hanya mempunyai lahan < 3 hektar (Tabel 2.). Dalam komunitas petani lokal di Desa PR, petani yang berada dalam kategori tersebut mencapai 42,59%, bahkan dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK mencapai 52,08%. Sementara itu, dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK, petani yang mempunyai lahan dengan luas 4 hektar atau lebih hanya 17,19 % sedangkan di Desa PR relatif lebih baik, yaitu mencapai 25,93%.

#### b. Ketimpangan dalam Pemilikan Lahan

Meskipun realitas struktur sosial komunitas petani lokal di Desa PR berbentuk stratifikasi, tetapi analisa "gini ratio" menunjukkan bahwa ketimpangan pemilikan lahan di dalam komunitas tersebut sudah memasuki kategori moderat (Tabel 3.). Bahkan bila lahan yang dikuasai para pengusaha kecil yang pemiliknya tinggal di luar desa (di kota provinsi) dimasukkan dalam analisa, ketimpangan pemilikan lahan di dalam komunitas tersebut sudah memasuki kategori tinggi. Sementara itu, pada komunitas petani PIR-Bun di Desa SK, meskipun struktur sosial komunitas sudah mendekati bentuk polarisasi, tetapi tingkat ketimpangan pemilikan lahannya masih berkategori rendah. Hal ini terjadi karena para petani pemilik dalam komunitas dimaksud umumnya merupakan petani kecil dengan luas pemilikan lahan relatif seragam (bukan pemilik luas ekstrim seperti tuan tanah).

Tabel 2. Distribusi rumahtangga petani di dua desa kasus berdasarkan luas penguasaan lahan, 2008.

| Luas Pemilikan        | Desa PR |        | Desa SK |        |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|
|                       | N       | %      | N       | %      |
| 0                     | 59      | 27,31  | 56      | 29,17  |
| > 0 - < 2             | 8       | 3,70   | 2       | 1,04   |
| 2 - < 3               | 84      | 38,89  | 98      | 51,04  |
| 3 - < 4               | 9       | 4,17   | 3       | 1,56   |
| > / 4                 | 56      | 25,93  | 33      | 17,19  |
| <b>Total</b>          | 216     | 100,00 | 192     | 100,00 |
| <b>Rata-rata</b>      |         | 2,48   |         | 2,07   |
| <b>Tertinggi (ha)</b> |         | 54,00  |         | 30,00  |

Sumber data : Sensus rumahtangga melalui FGD

Tabel 3. Analisa *gini ratio* terhadap luas pemilikan lahan pada komunitas petani kelapa sawit di dua desa kasus, 2008.

| Desa | Total Lahan Petani | Total Lahan Petani + Usaha Kecil |
|------|--------------------|----------------------------------|
| PR   | 0,45               | 0,77                             |
|      | M                  | T                                |
| SK   | 0,21               |                                  |
|      | R                  |                                  |

Keterangan : Nilai *Gini Ratio* < 0,4 = R = ketimpangan rendah, 0,4 0,5 = M = ketimpangan moderat, dan > 0,5 = T= ketimpangan tinggi

Sumber data: Diolah dari data sensus rumah tangga melalui FGD

### c. Mobilitas Sosial Vertikal dan Potensi Konflik Sosial antar Lapisan Petani

Berdasarkan pengalaman para petani, selama ini pada komunitas petani sawit masih terbuka jalan untuk berlangsungnya mobilitas sosial vertikal dari lapisan buruh tani (lapisan bawah) menuju lapisan petani pemilik (lapisan tinggi). Proses tersebut umumnya mereka lakukan melewati tangga lapisan petani pemilik + buruh tani (lapisan tengah). Para buruh tani yang mampu naik kelas umumnya merupakan rumah tangga muda (anak-anaknya masih SD) yang kebutuhan hidupnya masih relatif kecil sehingga dapat menyisihkan hasil berburuhnya untuk membeli lahan yang lokasinya relatif dekat dari tempat tinggal mereka.

Namun demikian, dengan semakin jauhnya lokasi lahan kosong yang mampu mereka kuasai (umumnya

berada di kecamatan/kabupaten lain), proses mobilitas sosial vertikal tersebut semakin sulit dilakukan karena mereka sulit membagi waktu antara menjalankan peran buruh tani untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya dengan peran petani pemilik miskin yang harus membangun kebun miliknya secara swadaya dan swadana. Nampaknya, kredit perbankan yang hadir di kedua komunitas petani kasus hanya diberikan kepada para petani pemilik kebun yang kebunnya sudah menghasilkan, bukan kepada buruh tani yang sedang membangun kebun.

Meskipun bentuk struktur sosial komunitas petani sawit di kedua desa kasus sudah menghampiri bentuk polarisasi, tetapi ternyata tidak dibarengi dengan munculnya konflik sosial antara kelas (lapisan) buruh tani dengan kelas (lapisan) petani pemilik. Adanya

Tabel 4. Tingkat kesejahteraan dan ciri sosial-ekonomi pada komunitas petani sawit di dua desa kasus, 2008.

| Tingkat Kesejahteraan | Ciri Sosial Ekonomi                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Miskin                | • Tidak punya lahan: buruh tani dan penggarap                                       |
|                       | • Rumah sederhana : ukuran relatif kecil dan seluruhnya terbuat dari papan          |
|                       | • Luas kebun milik < 1 ha atau > 1 ha tetapi belum menghasilkan                     |
| Sedang/Menengah       | • Luas kebun milik 2 - 5 ha                                                         |
|                       | • Rumah semi permanen : ukuran sedang, dinding terbuat dari tembok dan papan        |
| Kaya                  | • Luas kebun milik > 5 ha                                                           |
|                       | • Selain petani pemilik juga pegawai dan/atau pedagang                              |
|                       | • Rumah permanen : ukuran relatif besar dan seluruhnya terbuat dari tembok          |
| Kaya Raya             | • Luas kebun milik > 20 ha                                                          |
|                       | • Rumah mewah : ukuran relatif besar dan bertingkat, seluruhnya terbuat dari tembok |
|                       | • Mempunyai kendaraan roda empat yang berharga mahal (minimal kijang kapsul)        |

Sumber data dan informasi: Hasil rekonstruksi warga komunitas melalui FGD

jalan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal, perbedaan ciri sosial-ekonomi yang tidak ekstrim, serta adanya berbagai jalinan hubungan sosial di kebun dan di tempat tinggal telah menghasilkan sebuah komunitas petani sawit yang relatif harmonis.

### Diferensiasi Kesejahteraan Petani

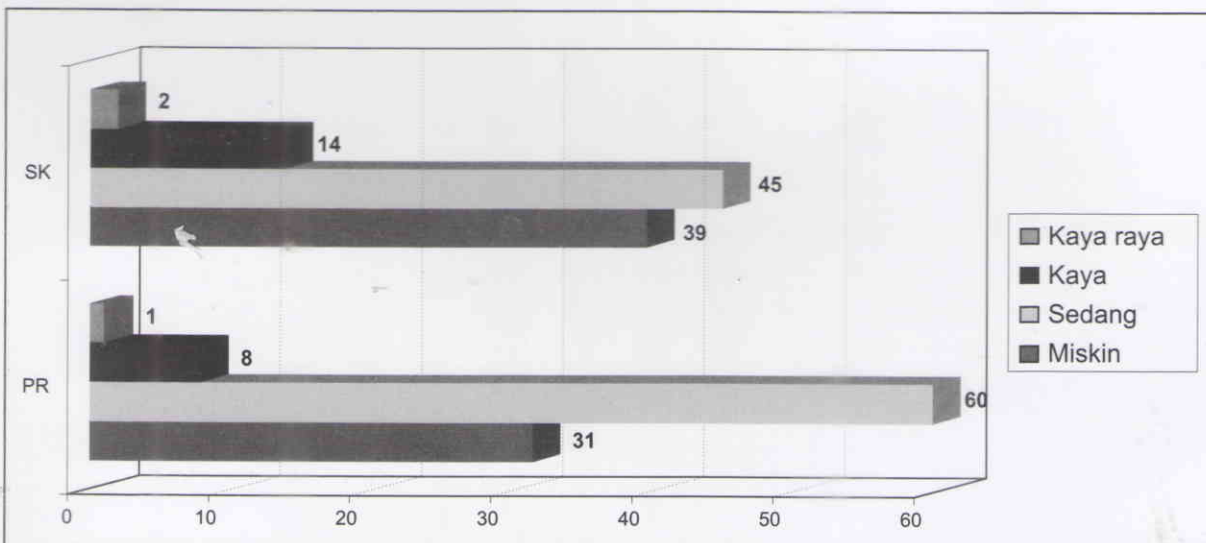
Sumber penghasilan yang saat ini tersedia di kedua komunitas petani kasus hampir seluruhnya berasal dari sumberdaya yang dimiliki secara perorangan. Di kedua komunitas tersebut, penghasilan dari sumberdaya komunal hampir tidak ada lagi, kecuali "brondolan" (buah sawit yang lepas dari tangkainya sebelum atau saat panen). "Brondolan" dikategorikan sebagai sumberdaya kolektif karena boleh diambil oleh siapa saja. Namun demikian, bagi para petani tunakisma, penghasilan dari "brondolan" hanya berperan sebagai penghasilan tambahan atau sebagai penghasilan alternatif manakala penghasilan utama mengalami penurunan tajam atau bahkan tidak tersedia.

Mengacu pada ciri-ciri sosial ekonomi yang dimiliki rumah tangga petani, hasil rekonstruksi melalui FGD menunjukkan bahwa ragam lapisan kesejahteraan di kedua komunitas petani kasus adalah sama (Tabel 4.). Baik dalam komunitas petani lokal di Desa PR maupun dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK, ternyata komunitas petani kelapa sawit terbagi dalam empat

lapisan, yaitu: 1) lapisan petani miskin, 2) lapisan petani sedang atau menengah, 3) lapisan petani kaya, dan 4) lapisan petani kaya-raya.

Walaupun demikian, di kedua komunitas tersebut terdapat perbedaan distribusi rumah tangga petani pada masing-masing lapisan kesejahteraan (Gambar 3.). Dalam komunitas petani lokal di Desa PR, proporsi petani miskin sangat dominan (60%) dan proporsi petani kaya relatif sedikit (8%). Sebaliknya, dalam komunitas petani PIR-Bun di Desa SK, proporsi petani miskin sudah berkurang (hanya 45%) dan proporsi petani kaya relatif besar (14%).

Data pada Tabel 4 juga menunjukkan sangat dominannya peran luas penguasaan lahan dalam menentukan lapisan kesejahteraan petani. Hal ini terjadi karena penghasilan dari kebun sawit merupakan sumber penghasilan utama, terutama di lokasi PIR-Bun dimana kebun sawitnya sudah menghasilkan dengan tingkat produktivitas tinggi (usia tanaman lebih dari 20 tahun). Namun demikian, petani PIR-Bun yang pemilikan kebun sawitnya hanya satu kapling (dua hektar) umumnya hanya tergolong petani sedang yang belum sejahtera. Para petani yang berada dalam lapisan kaya adalah mereka yang memiliki kebun sawit berproduksi lebih dari empat hektar. Sementara itu, para petani yang berada dalam lapisan petani kaya raya adalah mereka yang memiliki kebun sawit berproduksi 20 hektar atau lebih.



Sumber data: Sensus terbatas melalui FGD

Gambar 3. Distribusi rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan pada komunitas petani sawit di dua desa kasus, 2008.

Berdasarkan pengalaman petani, terdapat empat kunci sukses untuk menjadi kaya dan kaya raya, yaitu : 1) memiliki lahan yang luas, 2) memiliki uang (dari kampung atau kredit bank), 3) memiliki kepercayaan, 4) yakin dan gigih dalam berusaha.

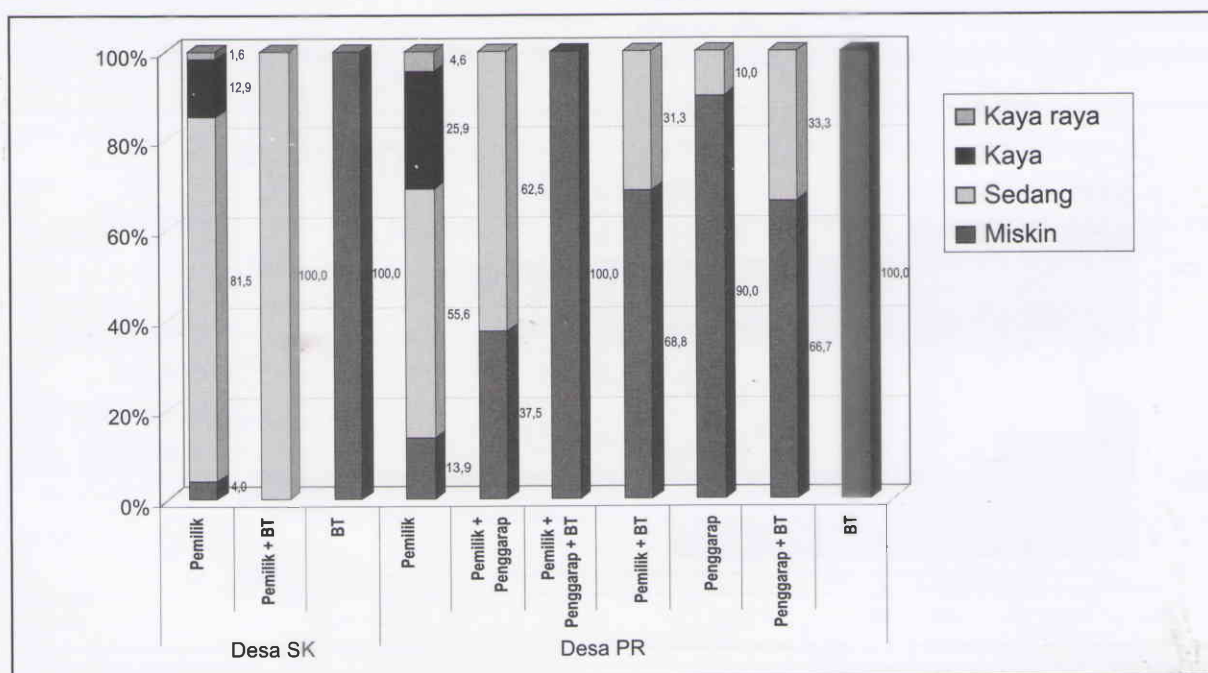
Munculnya lapisan petani kaya raya pada komunitas petani sawit terjadi karena proses akumulasi surplus pada petani kaya relatif mudah dilakukan, khususnya melalui mekanisme akumulasi penguasaan lahan yang didukung oleh tersedianya kredit perbankan (kredit komersial). Umumnya kredit perbankan tersebut dikururkan kepada para petani yang sudah memiliki kebun sawit berproduksi karena kebun sawit tersebut dapat dijadikan jaminan kredit. Dengan menguasai modal uang dari perbankan, mereka dapat melakukan ekspansi perluasan kebun sawit secara terus menerus.

Bila distribusi kesejahteraan petani sawit tersebut dikaitkan dengan status mereka dalam penguasaan lahan, Gambar 4 menunjukkan bahwa status pemilik tidak sepenuhnya menjamin petani berada pada tingkat kesejahteraan yang baik (lapisan kaya). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian petani pemilik masih berada pada lapisan sedang atau bahkan lapisan miskin. Hal ini terjadi karena luas

lahan yang mereka miliki relatif sempit atau kebun yang mereka miliki belum menghasilkan (berproduksi). Selain itu, para petani pemilik yang juga menjadi penggarap dan/atau buruh tani serta petani dengan status (tunggal) penggarap hanya berada pada lapisan sedang atau lapisan petani miskin. Bahkan seluruh buruh tani berada pada lapisan petani miskin.

## KESIMPULAN

Dalam komunitas petani yang seluruh lahannya digunakan untuk mengusahakan tanaman sawit, maka lapisan sosial yang muncul hanya tiga, yaitu : 1) lapisan petani pemilik (lapisan atas), 2) lapisan buruh tani (lapisan bawah), dan 3) lapisan pemilik + buruh tani (lapisan menengah). Bentuk struktur sosial tersebut mendekati bentuk struktur yang terpolarisasi, yaitu terkutubnya masyarakat dalam dua lapisan petani pemilik dan buruh tani yang tidak memiliki lahan. Bentuk struktur sosial komunitas petani tersebut mempunyai implikasi pada munculnya lapisan petani miskin, khususnya pada sebagian rumah tangga petani yang berada pada lapisan petani pemilik + buruh tani dan seluruh rumah tangga petani yang berada pada lapisan buruh tani. Walaupun demikian, bentuk struktur tersebut tidak disertai konflik sosial



Sumber data : Sensus terbatas melalui FGD

Gambar 4. Distribusi kesejahteraan petani kelapa sawit berdasarkan status penguasaan lahan di dua desa kasus, 2008.

antar lapisan petani, terkait adanya jalan bagi proses mobilitas sosial vertikal, perbedaan status sosial-ekonomi antar lapisan tidak ekstrim, serta adanya beragam jalinan hubungan sosial diantara petani yang tinggal dalam satu pemukiman.

Meskipun seluruh buruh tani masih berada pada tingkat kesejahteraan miskin, tetapi adanya akses dalam menguasai lahan kosong dapat memberi jalan bagi berlangsungnya mobilitas sosial vertikal. Dalam hal ini para buruh tani mempunyai kemampuan untuk naik kelas menjadi petani pemilik + buruh tani (lapisan menengah) dan kemudian menjadi petani pemilik. Namun demikian, akhir-akhir ini, dengan semakin jauhnya lokasi lahan kosong yang dapat mereka akses serta tidak tersedianya kredit perbankan bagi tunakisma buruh tani menyebabkan jalan naik kelas bagi mereka semakin tertutup.

Oleh sebab itu, dalam lingkup sektoral (perkebunan), masalah rendahnya akses buruh tani miskin (masalah struktural) terhadap penguasaan lahan perlu diatasi melalui pengaturan penguasaan lahan yang memberikan akses seluas-luasnya kepada para petani dimaksud (bukan kepada petani kaya dan kaya raya atau perusahaan besar). Dalam lingkup nasional, upaya mengatasi masalah struktural di sektor perkebunan harus dibarengi dengan pembukaan lapangan berusaha/bekerja non pertanian agar dapat menyerap pertumbuhan warga komunitas petani yang selama ini terus menerus harus ditampung di sektor perkebunan.

Bila tidak demikian, meskipun struktur sosial komunitas petani kelapa sawit memiliki kemampuan untuk menampung warga komunitas petani yang terus bertambah tetapi dalam jangka panjang realitas tersebut akan diikuti dengan meningkatnya "gejala involusi". Dalam gejala ini, para petani pemilik kecil yang jumlahnya terus bertambah harus menampung anggota keluarga dan/atau kerabat lain untuk dijadikan buruh tani karena tidak tersedia peluang bekerja atau berusaha lain yang dapat menyediakan sumber penghasilan. Lebih lanjut, meningkatnya gejala involusi tersebut akan meningkatkan "problema kemiskinan" karena tingkat kehidupan (kesejahteraan) sebagian besar warga komunitas akan berada dekat garis kemiskinan (hanya mampu bertahan hidup) atau bahkan berada di bawah garis kemiskinan (kelaparan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2007. Pedoman umum program revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kakao). Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2008. Statistik perkebunan Indonesia 2007-2009. Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta.
- Fadjar, U., B. Drajat, M.T.F. Sitorus, dan M.A. Sunita. 2002. Penduduk, kebun karet, dan kemiskinan. Lembaga Riset Perkebunan. Bogor
- Fadjar, U., M.T. Felix Sitorus, A.H. Dharmawan, dan S.M.P. Tjondronegoro. 2008. Bentuk struktur sosial komunitas petani dan implikasinya terhadap diferensiasi kesejahteraan: studi kasus pada komunitas petani kakao di Sulawesi Tengah dan NAD. Pelita Perkebunan. Jurnal Penelitian Kopi dan Kakao: Volume 24 No. 3, Desember 2008.
- Hayami, Y. dan Masao Kikuchi. 1987. Dilema ekonomi desa. Suatu pendekatan ekonomi terhadap perubahan kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Newman, W. L. 1997. Social research methods. Qualitative and quantitative approaches. Allyn and Bacon. Boston.
- Ray, C. 2002. A mode of production for fragile rural economics : The territorial accumulation of form of capital. Journal of Social Studies. 18 (2002) 225-231.
- Syahza, A. dan S. Kaswarina. 2007. Pembangunan perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan petani di daerah Riau. Jurnal Sorot. Volume 1 No 2. Oktober 2007. Lembaga Penelitian Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sunderson, S. K. 2003. Makro sosiologi. Sebuah pendekatan terhadap realitas sosial. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yin, R. K. 2002. Sudi Kasus. Desain dan metoda. PT. Raja Grafitia Persada. Jakarta.